

PEMAKNAAN WACANA KRITIK KEKUASAAN DALAM LAGU PUNK “GELAP GEMPITA” KARYA SUKATANI OLEH DEMONSTRAN INDONESIA GELAP

Khizbulloh Huda, Agus Naryoso
khizbullohh@gmail.com

Program Studi S1 Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang | Kotak Pos 1269 | Telepon (024) 746407
Faksimile (024) 746504 | Laman: <https://fisip.undip.ac.id/> | Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Research on the punk subculture in Indonesia shows that anarchism is not merely an aesthetic but an ideological foundation of daily communal life. However, studies remain focused on internal subcultural actors, while mainstream reception is scarcely addressed. The police ban on Sukatani's work in February 2025, intersecting with the Indonesia Gelap demonstrations, marked a moment when anarchist texts circulated as protest anthems in public, opening the study of mainstream reception. Drawing on John Fiske's popular culture model through in-depth interviews with five demonstrators, this study finds that platform mediation decontextualized “Gelap Gempita,” while state repression triggered repoliticization. Despite diverse ideological positions, all participants formed a convergent relational pattern positioning dominant power against subordinate resistance: four negotiated anarchism into democratic critique, one embraced it more fully. The producerly text enables polysemy, yet the limited discursive legacy of the Left post-New Order constrains articulation within the logic of formal institutions.

Keywords: *reception analysis, popular culture, subculture, anarchism, protest music, punk music, Sukatani, Indonesia Gelap demonstration, power critique*

ABSTRAK

Penelitian subkultur punk di Indonesia menunjukkan anarkisme tidak hanya sebagai estetika, melainkan landasan ideologis keseharian komunal. Namun, kajian masih berfokus pada aktor internal subkultur, sementara resepsi arus utama minim dibahas. Pembredelan Sukatani oleh kepolisian pada Februari 2025 yang beririsan dengan demonstrasi Indonesia Gelap menjadi momen ketika teks anarkis beredar sebagai *anthem* protes di ruang publik, sehingga membuka kajian resepsi arus utama. Dengan analisis resepsi yang merujuk pada model budaya populer John Fiske melalui wawancara mendalam terhadap lima demonstran, penelitian ini menemukan bahwa mediasi platform mendekontekstualkan “Gelap Gempita,” sementara represi aparat memicu repolitisasi. Meski posisi ideologis beragam, seluruh partisipan membentuk pola relasional konvergen yang menempatkan kekuasaan dominan berhadapan dengan resistensi subordinat: empat menegosiasikan anarkisme menjadi kritik demokratis, satu menerimanya lebih utuh. Sifat *producerly* teks memungkinkan polisemi, tetapi keterbatasan warisan diskursif Kiri pasca-Orde Baru membatasi artikulasi dalam logika institusi formal.

Kata Kunci: *analisis resepsi, budaya populer, subkultur, anarkisme, musik protes, musik punk, Sukatani, demonstrasi Indonesia Gelap, kritik kekuasaan*

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, penelitian mengenai subkultur punk di Indonesia menunjukkan bahwa anarkisme tidak hanya hadir sebagai estetika pembeda, melainkan sebagai landasan ideologis yang dihidupi dalam praktik keseharian komunitas. Xiao dan Donaghey (2022) menunjukkan bahwa skena punk di Indonesia beroperasi melalui prinsip anarkisme dan etos do-it-yourself dengan logika otonomi tersendiri, sementara Moog (2023) melalui konsep punk worlding menegaskan bahwa praktik kolektif dalam skena anarko-punk membentuk dunia sosial dengan koherensi ideologis. Temuan ini diperkuat oleh Al Fajri (2024) yang menunjukkan bahwa nilai kolektivisme dan penolakan terhadap hierarki dihidupi dalam keseharian komunitas, meskipun terus berhadapan dengan tekanan budaya dominan.

Dalam kajian subkultur, arus utama (*mainstream*) lebih sering hadir sebagai kategori konseptual dibandingkan sebagai subjek empiris. Hannerz (2013) menunjukkan bahwa *mainstream* berfungsi sebagai titik acuan simbolik yang diproduksi secara diskursif oleh subkultur itu sendiri untuk mendefinisikan diri. Sementara itu, Thornton (1995) menegaskan bahwa batas antara subkultur dan arus utama bersifat ko-konstitutif karena dibentuk melalui relasi dengan

media dan industri budaya. Namun demikian, meskipun hubungan ini telah diakui secara teoretis, kajian yang secara sistematis menempatkan audiens di luar subkultur sebagai subjek penelitian masih sangat terbatas. Sadler (2022) dan Groth & Bubandt (2025) menunjukkan bahwa teks kultural dapat mengalami pergeseran makna ketika berpindah lintas arena, tetapi keduanya juga mengakui absennya analisis terhadap audiens sebagai produsen makna.

Keterbatasan ini menjadi relevan ketika teks subkultural tidak lagi beredar secara eksklusif dalam komunitasnya, melainkan memasuki ruang publik yang lebih luas. Salah satu momen yang memperlihatkan perlintasan tersebut adalah peristiwa yang dialami oleh Sukatani pada Februari 2025. Pembredelan lagu “Bayar Bayar Bayar”, disertai tekanan terhadap personel band sebagaimana dilaporkan oleh Lova dan Maharani (2025), Nurikhsan (2025), serta Hayati (2025), tidak hanya menghentikan distribusi karya secara formal, tetapi justru memicu perhatian publik yang lebih luas. Alih-alih meredam, tindakan tersebut menghasilkan solidaritas publik yang terekam dalam tagar #KamiBersamaSukatani dan berbagai aksi kolektif (Ayu, 2025; KompasTV Jateng, 2025).

Peristiwa ini beririsan dengan kemunculan gerakan Indonesia Gelap, yang berkembang dari aktivisme digital menjadi

demonstrasi kolektif di berbagai kota (Rosana, 2025). Dalam konteks aksi pada 20 hingga 21 Februari 2025, lagu “Bayar Bayar Bayar” yang telah ditarik dari platform digital justru digunakan sebagai anthem protes oleh demonstran di ruang publik (N. P. Nugroho, 2025; CNN Indonesia, 2025b). Pada titik ini, teks yang sebelumnya beredar dalam ruang subkultural berpindah ke arena arus utama dan berfungsi sebagai medium artikulasi kritik kolektif.

Perpindahan arena ini menjadi signifikan ketika dikaitkan dengan muatan ideologis dalam karya Sukatani. Album “Gelap Gempita” memuat kritik sosial yang mencakup isu korupsi, konsumerisme, hingga relasi kekuasaan, sebagaimana terlihat dalam lagu-lagu seperti “Bayar Bayar Bayar” dan “Gelap Gempita”. Dalam lagu “Gelap Gempita” yang diposisikan sebagai penutup sekaligus *title track*, oposisi antara kekuasaan dan resistensi dikonstruksi secara eksplisit melalui lirik yang menempatkan kekuasaan sebagai sumber kezaliman dan menghadirkan metafora perlawanan terhadapnya. Selain itu, penggunaan simbol visual dalam identitas band memperkuat artikulasi tersebut. Bendera hitam secara historis merujuk pada tradisi penolakan terhadap otoritas negara (Woodcock, 1962; Ehrlich, 1996), sementara simbol *circle-A* telah lama diasosiasikan dengan anarkisme

sebagai gagasan tentang keteraturan tanpa otoritas terpusat (Chinnici, 2008).

Lirik yang menempatkan kekuasaan sebagai pusat kezaliman dan menghadirkan metafora “bendera” sebagai penghalang kemenangan penguasa membangun oposisi yang tegas antara dominasi dan resistensi. Pada saat yang sama, penggunaan bendera hitam sebagai identitas visual merujuk pada tradisi penolakan terhadap otoritas negara yang melembagakan tatanan yang dibangun di atas representasi segelintir orang untuk mewakili banyak orang (Woodcock, 1962; Ehrlich, 1996), sementara simbol *circle-A* telah lama diasosiasikan dengan anarkisme sebagai gagasan tentang keteraturan tanpa otoritas terpusat (Chinnici, 2008).

Meskipun demikian, posisi ideologis tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit oleh Sukatani. Dalam wawancara dengan *Medcom*, mereka justru menyebut diri mereka sebagai band *new-wave* (Rachmat, 2025). Namun, sebagaimana dicatat dalam *liner note* album yang ditulis oleh Wok The Rock (2023), pendekatan musikal tersebut tetap berakar pada tradisi *post-punk*. Lirik yang frontal dan politis, serta penggunaan simbol dan gaya visual yang dekat dengan tradisi ideologis tertentu menunjukkan bahwa muatan ideologis dikomunikasikan melalui praktik stilistik. Dalam kerangka kajian subkultur, hal ini sejalan dengan pemahaman Hebdige (1979) bahwa gaya berfungsi sebagai bentuk penandaan yang

mengodekan makna sosial dan politik melalui simbol.

Dalam konteks Indonesia, artikulasi semacam ini tidak hadir dalam ruang yang netral. Heryanto (2008, 2018) menunjukkan bahwa identitas keindonesiaan terbentuk melalui kontestasi historis antara Tradisi, Islam, Liberalisme, serta Marxisme dan spektrum Kiri. Namun, sejak penghancuran politik 1965, spektrum Kiri dieliminasi secara fisik dan diskursif, sehingga kritik terhadap ketimpangan struktural tidak lagi memiliki pijakan yang kuat dalam wacana publik. Dalam lanskap ini, kritik sosial lebih sering dimediasi melalui bahasa moralitas dan identitas (Heryanto, 2018; Butcher, 2021). Posisi ini diperkuat oleh praktik stigmatisasi, di mana komunitas punk kerap dilekatkan pada kategori deviasi sosial dalam perspektif hukum (Sudarsono, 2004), sementara anarkisme direduksi menjadi tindakan destruktif dalam wacana media (Cahya, 2015).

Dalam peredaran di ruang publik, pembacaan terhadap karya Sukatani tidak selalu berlangsung dalam kerangka ideologis asalnya. Diskursus media dan respons publik pasca pembredelan menunjukkan kecenderungan untuk memposisikan Sukatani ke dalam logika wacana “kritik yang membangun,” dan sebagai “*check and balances*”, terutama dalam kaitannya dengan isu kebebasan

berekspresi dan kontrol terhadap kekuasaan (UGM, 2025, Maret 3; Kompas.com, 2025, Februari 24). Dalam konteks ini, muncul kemungkinan bahwa elemen-elemen kritik yang berakar pada tradisi anarkis tidak dibaca secara menyeluruh, melainkan dinegosiasikan dan diserap ke dalam kerangka kritik demokratis dalam wacana arus utama.

Fenomena ini dapat dipahami sebagai dinamika antara keterbukaan makna teks dan relasi hegemonik dalam budaya. Barthes (1972) memandang teks sebagai pembawa fragmen ideologi yang terbuka terhadap pembacaan ulang, sehingga makna tidak melekat secara tetap pada intensi pencipta. Sementara itu, Williams (1977) menunjukkan bahwa praktik kultural yang tidak terserap dalam budaya dominan dapat muncul sebagai bentuk *emergent*, namun dalam peredarannya praktik tersebut juga berpotensi dinegosiasikan atau diserap ke dalam tatanan dominan. Dengan demikian, peredaran lagu Sukatani dalam konteks Indonesia Gelap membuka ruang untuk melihat bagaimana elemen-elemen yang berada pada posisi *emergent* dapat mengalami pembacaan ulang dalam relasi antara pengalaman sosial audiens dan struktur wacana hegemonik.

Dengan demikian, ketika teks yang memuat elemen ideologis dari tradisi yang terpinggirkan ini beredar dalam konteks

demonstrasi, persoalan yang muncul tidak lagi hanya berkaitan dengan produksi makna yang sekadar menjadi konsumsi pemuas diri, melainkan bagaimana fragmen ideologi tersebut diterima atau digeser dalam produksi makna untuk mengartikulasikan wacana kritik kekuasaan yang disediakan struktur teks.

Namun demikian, studi-studi mengenai Sukatani yang muncul pasca peristiwa tersebut masih didominasi oleh analisis teks dan wacana. Iman (2025), Afriadi & Andiko (2025), serta Widagdo et al. (2026) menyoroti dimensi kritik terhadap kekuasaan dalam struktur lirik dan wacana, tetapi belum secara memadai menempatkan audiens sebagai subjek utama dalam produksi makna. Studi oleh Indah Syahputri & Arviani (2026) memang telah melibatkan audiens, namun berfokus pada citra institusi kepolisian, bukan pada negosiasi muatan ideologis dalam teks.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini berfokus pada bagaimana demonstran Indonesia Gelap—sebuah kelompok interpretif yang terlibat dalam momen gerakan arus utama pro-demokrasi—memaknai lagu “Gelap Gempita.” Dengan menggunakan analisis resepsi yang merujuk pada model budaya populer John Fiske, penelitian ini memandang teks sebagai sumber daya semiotik yang dapat diartikulasikan ulang dalam relasi antara kekuasaan dominan dan

kelompok subordinat. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap bagaimana audiens arus utama menegosiasikan makna dari teks subkultural yang membawa muatan ideologis dari tradisi yang secara historis terpinggirkan.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses dekontekstualisasi fragmen ideologi anarkis dalam lagu “Gelap Gempita” ketika beredar di ranah budaya populer, serta memahami bagaimana demonstran Indonesia Gelap melakukan negosiasi makna terhadap fragmen ideologi tersebut sehingga terartikulasikan sebagai kritik demokratis.

KERANGKA TEORETIS

Penelitian ini berpijak pada kerangka budaya populer John Fiske yang memandang budaya sebagai medan pertarungan makna antara blok kekuasaan dan rakyat. Dalam masyarakat kapitalis lanjut, distribusi modal ekonomi, kultural, dan sosial berlangsung timpang (Bourdieu, 1984). Ketimpangan ini membentuk dua kelompok kepentingan strategis yang cair: *power-bloc*, yakni aliansi formasi sosial yang diuntungkan secara struktural dengan akses istimewa terhadap sistem kekuasaan, dan *the people* (rakyat), yakni afiliasi sosial subordinat dengan akses terbatas terhadap

sumber daya (Fiske, 1993). Blok kekuasaan menjalankan *imperializing power* yang beroperasi secara sentripetal untuk memperluas jangkauan kendali melalui mekanisme hegemoni dan normalisasi, sementara rakyat menjalankan *localizing power* yang beroperasi secara sentrifugal untuk mendapatkan kontrol atas diri dan kondisi langsung mereka (Fiske, 1993).

Budaya populer didefinisikan Fiske (1989a) sebagai budaya yang dibuat oleh berbagai formasi subordinat dari sumber daya wacana dan material yang disediakan oleh sistem sosial yang tidak memberdayakan mereka. Budaya populer adalah situs kontradiksi aktif yang membenturkan kepentingan finansial industri dengan kepentingan kultural rakyat. Untuk menjelaskan kontradiksi ini, Fiske (1989a; 1989b) membedakan dua ekonomi paralel yang semi-otonom. Dalam ekonomi finansial, sirkulasi berpusat pada uang dan profit, di mana komoditas budaya membawa *lines of force* hegemonik yang bekerja demi status quo. Dalam ekonomi kultural, sirkulasi berpusat pada makna dan kenikmatan, di mana audiens mengubah komoditas budaya menjadi sumber daya budaya melalui eksorporasi—proses mengambil komoditas industri dan menggunakannya untuk tujuan yang tidak searah dengan intensi produsen (Fiske, 1989b).

Kapasitas eksorporasi dimungkinkan oleh karakter teks populer yang oleh Fiske (1989a) disebut sebagai *producerly*: teks yang mengundang pembaca ikut serta dalam konstruksi maknanya, namun tetap mudah dibaca karena tidak menuntut kompetensi tinggi. Teks *producerly* mengandung kekuatan *closure* (upaya mengontrol makna) sekaligus *openness* (ruang bagi pembaca untuk membuat makna sendiri), di mana celah sintagmatik memungkinkan berbagai formasi rakyat mengartikulasikan kepentingan mereka melalui teks yang sama (Fiske, 1987).

Kekuasaan audiens dalam memproduksi makna bertumpu pada konsep subjektivitas. Berbeda dengan individualitas yang merujuk pada aspek biologis, subjektivitas sepenuhnya bersifat sosial: ia diproduksi secara simultan oleh berbagai institusi dan wacana yang sering bertentangan—keluarga, sistem pendidikan, media, hukum negara, dan agama (Fiske, 1987). Kontradiksi antar-wacana ini menghasilkan subjek yang terfragmentasi, cair, dan penuh kontradiksi, yang memungkinkan individu berpindah-pindah kesetiaan sosial sesuai konteks dan kebutuhan. Fiske (1991) menyebut kapasitas ini sebagai subjektivitas nomaden, di mana rasa oposisi terhadap blok kekuasaan menjadi perekat yang lebih kuat daripada kesamaan identitas. Momen

pembacaan terjadi ketika wacana pembaca bertemu dengan wacana teks—ketika keduanya memiliki kepentingan berbeda, pembacaan menjadi rekonsiliasi dari konflik tersebut (Fiske, 1987).

Subkultur dalam kerangka ini dipahami sebagai salah satu bentuk paling substansial dari *localizing power* yang menciptakan *locale*—ruang fisik, sosial, dan kesadaran yang memungkinkan pengakuan atas identitas dan makna alternatif (Fiske, 1993). Subkultur muncul karena budaya dominan tidak mampu sepenuhnya mengakomodasi seluruh praktik dan aspirasi manusia (Williams, 1977). Eksistensi subkultur bersifat ko-konstitutif dengan *mainstream* karena dibentuk melalui relasi dengan media dan industri budaya (Thornton, 1995). Interaksi subkultur dengan media menghasilkan siklus inkorporasi—penyerapan elemen subversif ke dalam logika pasar dan pembingkai ulang sebagai tren yang aman—dan ekskorporasi sebagai respons defensif yang memicu inovasi baru (Haenfler, 2023). Thornton (1995) menunjukkan bahwa liputan media massa yang positif justru mengancam karena menghilangkan nilai distingtif subkultur (*kiss of death*), sementara liputan negatif justru memperkuat aura transgresifnya.

Musik dalam kerangka ini diposisikan sebagai wacana yang menyampaikan pesan dan emosi melalui

tanda-tanda. Mengacu pada hierarki semiotika Fiske (1987) yang ditranslasikan oleh Rodman (1997), teks musik dipahami melalui tiga tingkatan: realitas musikal (nada, timbre, ritme, waktu), representasi melalui kode teknis dan topik stilistik yang dikenali sebagai format gaya atau genre, serta ideologi yang direpresentasikan secara kultural. Topik stilistik adalah penghubung antara musik dengan ideologi kultural asalnya (Agawu, 1991; Rodman, 1997). Dalam konteks musik populer, gaya musik membangkitkan referensi intertekstual dan asosiasi kultural yang menghubungkan pendengar dengan kelompok sosial dan ideologi tertentu. Meski makna dalam musik populer lebih mudah diakses melalui lirik, kenikmatan lebih mudah diperoleh dari elemen musikal yang memberikan intensitas emosional (Fiske, 1989b). Dengan demikian, semiosis musik diposisikan bukan sebagai analisis musikologis, melainkan sebagai peta konseptual yang menegaskan bahwa makna musik terbentuk dari interaksi antara topik stilistik teks dan subjektivitas audiens dalam momen pembacaan.

GAMBARAN UMUM

Subkultur Punk dan Anarkisme di Indonesia

Anarkisme kerap direpresentasikan secara simplifikatif sebagai kekacauan, padahal istilah ini berasal dari bahasa

Yunani anarkhos yang berarti tanpa pemerintahan, bukan tanpa tatanan—sejajar dengan monarki (pemerintahan satu orang) dan oligarki (pemerintahan segelintir orang) (Kinna, 2005). Inti dari pemikiran ini terletak pada paradoks yang ditegaskan Proudhon: anarki adalah ketertiban, pemerintahan adalah perang sipil. Anarkisme menolak negara bukan sebagai alat kelas semata seperti dalam tradisi Marxis, melainkan sebagai institusi yang memiliki logika kekuasaan sendiri untuk bertindak sebagai pencipta hak istimewa baru melalui tiga instrumen dominasi: monopoli kekerasan, otoritas yang melegitimasi kapasitas memerintah, serta kekuasaan yang ditegakkan melalui paksaan maupun tipu daya (Kinna, 2005). Meski menolak hierarki koersif, anarkisme tidak menolak pengorganisasian sosial; ia menawarkan swa-pemerintahan yang mengakui otoritas alami yang muncul secara sukarela dari bawah. Dalam posisi politisnya, anarkisme berada di persimpangan antara liberalisme dan sosialisme — mengambil aspek kebebasan individu tanpa kapitalisme dan aspek kesetaraan tanpa otoritas negara (Kinna, 2005). Namun anarkisme adalah spektrum, bukan doktrin tunggal: ia mencakup mutualisme Proudhon yang menerima kepemilikan berbasis penggunaan, kolektivisme Bakunin yang mendasarkan distribusi pada kinerja kerja, anarko-

komunisme Kropotkin yang menolak sistem upah demi distribusi berdasarkan kebutuhan, hingga ekologi sosial Bookchin yang mengusung demokrasi langsung berbasis munisipalisme. Pilihan strategi perjuangannya pun beragam, dari insureksi dan aksi langsung hingga anarkisme evolusioner yang membangun institusi tandingan sebagai cara menggerogoti dominasi negara secara perlahan tanpa revolusi kekerasan (Kinna, 2005).

Anarkisme bukan merupakan ideologi baru di Indonesia. Benih anti-otoritarianisme masuk melalui celah kolonialisme itu sendiri, berakar dari Belanda yang sempat menjadi pusat aktivitas anarkis Eropa pasca-Kongres Anarkis Internasional 1907 di Amsterdam (B. S. Putra, 2018). Gagasan ini diperkenalkan secara eksplisit oleh Ernest Douwes Dekker melalui majalah *Het Tijdschrift* (1911–1913), sementara Politik Etis membuka akses pendidikan Eropa yang mempertemukan tokoh-tokoh seperti Sjahrir dan Hatta dengan gerakan anarkis di Belanda. Manifestasi paling terorganisir muncul dalam gerakan anarko-sindikalisme melalui serikat buruh kereta api VSTP di Semarang, di mana metode aksi langsung dan pemogokan massal diadopsi sebagai strategi perjuangan (B. S. Putra, 2018). Namun, kegagalan Pemberontakan 1926 menjadi momen krusial peminggirannya. Dari dalam kubu Kiri sendiri, Tan Malaka

mengkritik elemen anarkis yang mengandalkan aksi teror individual tanpa basis massa, sementara Semaoen menyerukan pembersihan elemen anarkis dari partai agar sesuai dengan disiplin Komintern. Penolakan ini dipertegas Soekarno pada 1933 yang memandang anarko-sindikalisme sebagai kekacauan (B. S. Putra, 2018). Meski jejak anarko-sindikalisme sempat muncul singkat melalui aksi swakelola buruh pada masa Revolusi Kemerdekaan 1945–1946, gerakan ini segera diberangus oleh Pemerintah Republik. Sejak itu, anarkisme secara efektif terhapus dari leksikon politik Indonesia hingga kebangkitannya melalui subkultur punk pada akhir Orde Baru.

Kebangkitan gelombang kedua anarkisme di Indonesia terjadi melalui subkultur punk pada akhir Orde Baru. Punk meresap melalui dua jalur: jejaring tongkrongan *underground* dan mediasi masif MTV yang mengudara sejak 1995 (Moog, 2020). Di Bandung, kolektif punk mendirikan Riotic (1996) sebagai distro pertama di Indonesia sekaligus simpul distribusi literatur anarkis internasional, yang melahirkan zine politik pertama *Submissive Riot* (Prasetyo, 2017). Politisasi punk mencapai puncaknya melalui pembentukan Front Anti-Fasis (FAF) pada 1997 yang bahu-membahu dengan gerakan mahasiswa menggulingkan Suharto (Donaghey, 2016; Prasetyo, 2017). Meski

organisasi formal seperti FAF dan Jaringan Anti Fasis Nusantara bubar di awal 2000-an, eksponen-eksponennya mengalihkan perjuangan ke akar rumput, membangun kolektif perpustakaan jalanan, penerbitan independen, dan infrastruktur ekonomi mandiri yang mencerminkan politik prefiguratif—praktik menghidupi tatanan alternatif di sini dan saat ini (B. S. Putra, 2018).

Politik Prefiguratif Sukatani

Sukatani lahir dari rahim tradisi ini. Kedua personelnya terlibat dalam pembentukan kolektif petani muda Harvestmind pada 2018 di Purbalingga, yang bermula dari gerakan perpustakaan jalanan. Kolektif ini, yang secara internal juga dikenal sebagai Black Farm Municipal—terminologi yang merujuk pada konsep pengorganisasian otonom dan desentralistik eko-anarkis Murray Bookchin—menerjemahkan anarkisme ekologis ke dalam praktik agrikultural konkret: pertanian organik berbasis agroekologi, penolakan hierarki vertikal dalam pengorganisasian, pembentukan koperasi petani untuk kedaulatan harga, serta negosiasi ulang sistem bagi hasil feodal demi keadilan bagi penggarap (Pirate Book [Zine], 2017; Sobat-Ngantuk, 2020; Tarigan, 2024).

Posisi ideologis ini juga termanifestasi dalam simbolisme kultural.

Proyek solo Syifasativa milik Alectroguy (gitaris Sukatani) secara eksplisit menolak institusi kepresidenan dalam lagu “Rakyat Gak Butuh Presiden” dan merekam represifitas aparat dalam “Ketika Polisi Datang”—jauh sebelum “Bayar Bayar Bayar” viral. Penggunaan simbol visual “al-anarkiyah minal iman” (anarkisme bagian dari iman) merupakan praktik *cultural jamming* yang menempatkan pembebasan dari penindasan sebagai manifestasi keimanan dalam lanskap pasca-Orde Baru di mana Islam menempati posisi kuat sebagai kekuatan sosial.

Konsistensi ideologis Sukatani meluas hingga moda produksi dan distribusi. Album “Gelap Gempita” diproduksi melalui infrastruktur kolektif mandiri—direkam di Ruang Gulma (ekosistem seni multidisiplin di Yogyakarta), dikelola oleh Avant Garden Club sebagai kolektif hibrida yang menangani hulu-hilir produksi—dan didistribusikan melalui Dugtrax Records dengan lisensi Creative Commons di bawah slogan “Punx to Copy and Share for Free” (“[DR018] SUKATANI – Gelap Gempita,” 2023). Pilihan distribusi *Free Culture* ini merupakan antitesis terhadap industri budaya yang memandang karya seni semata-mata sebagai komoditas tertutup (A. Pramudita, 2010). Dengan demikian, “Gelap Gempita” eksis bukan sekadar sebagai produk hiburan, melainkan sebagai

artefak budaya tanding yang diproduksi oleh infrastruktur otonom—sebuah konteks produksi yang, ketika teks memasuki sirkulasi platform digital, mengalami dekontekstualisasi dan terlepas dari genealogi ideologisnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme sosial kritis dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis resepsi dipilih untuk menangkap variasi interpretasi audiens, dibangun di atas kerangka budaya populer Fiske. Berbeda dengan model tipologi *encoding/decoding* Hall yang dalam penerapannya sering cenderung mereduksi hasil ke dalam klasifikasi statis (Morley, 1992), pendekatan Fiskean berfokus pada bagaimana seseorang menghubungkan teks budaya populer dengan dunia kulturalnya untuk memunculkan makna terkait pemahaman realitas bagi dirinya sendiri.

Teknik pengumpulan data utama adalah wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilakukan dalam rentang akhir September hingga awal November 2025. Periode ini berada dalam fase eskalasi represif pasca-aksi Agustus–September, di mana sejumlah organisasi masyarakat sipil mencatat kejadian ini sebagai perburuan aktivis terbesar sejak Reformasi 1998 (Komisi Pencari Fakta, 2026). Kondisi ini membentuk atmosfer

kewaspadaan yang memengaruhi akses terhadap partisipan, sehingga perekrutan dilakukan melalui mediasi pihak ketiga yang memiliki relasi kedekatan dengan calon partisipan untuk meminimalisasi risiko dan membangun kepercayaan.

Lima partisipan dipilih secara purposif dengan kriteria: (1) pernah terlibat secara langsung dalam demonstrasi Indonesia Gelap, (2) bukan bagian dari subkultur musik bawah tanah, dan (3) memiliki pengalaman mendengarkan lagu-lagu Sukatani. Kelima partisipan merepresentasikan keberagaman latar sosial, motivasi, dan afiliasi gerakan.

Tabel 1 Profil ideografis partisipan

Parti-sipan	Usia	Gender	Pekerjaan	Afiliasi Gerakan
LX	24	L	Mahasiswa Filsafat	Aliansi Mahasiswa UGM
SH	31	L	Karyawan Swasta	Bareng Warga
AW	22	L	Mahasiswa Ilmu Politik	Afinitas Black Bloc
AC	23	P	Jurnalis	Media alternatif Konde.co
WS	21	L	Mahasiswa Hukum	BEM SI, UPNVJ Bergerak

Seluruh partisipan secara eksplisit menolak identifikasi sebagai “anak skena.” Keterlibatan mereka dalam konsumsi musik diposisikan sebagai praktik sosial kontekstual dan situasional, bukan afiliasi subkultural eksklusif.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan yang mencakup tiga tahap: (1) eksplorasi latar belakang

partisipan, posisi ideologis, dan keterlibatan dalam gerakan; (2) pembacaan lagu “Gelap Gempita” yang mencakup dimensi lirikal, musikal, dan visual video musik; serta (3) pembacaan album secara keseluruhan dan negosiasi terhadap fragmen ideologis anarkisme.

Data dianalisis melalui analisis tematik-dialogis (Akhtar et al., 2024) yang menerapkan *Reflexive Thematic Analysis* (Braun & Clarke, 2006, 2019) untuk memetakan pola makna antar-partisipan, diperdalam dengan *Dialogical Analysis* Bakhtinian untuk membedah subjektivitas melalui fitur-fitur dialogis dalam ujaran partisipan. Kredibilitas dijaga melalui triangulasi data wawancara, analisis teks budaya, dan kajian pustaka, serta peninjauan transkrip oleh partisipan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum memasuki analisis pembacaan partisipan, perlu disajikan terlebih dahulu teks lagu “Gelap Gempita” secara utuh sebagai objek resepsi. Lagu ini terdiri dari tiga bagian: verse berbahasa Indonesia yang membangun oposisi terhadap kekuasaan, chorus berbahasa Inggris yang menghadirkan metafora perlawanan simbolik, dan outro berbahasa Jawa Banyumasan yang membawa dimensi lokalitas dan pengalaman hidup agraris.

[VERSE]
 Di dalam otak mereka hanyalah kekuasaan
 Di dalam hati mereka tak ada kepuasan
 Di dalam cara mereka terpampang kezaliman
 Di dalam harap mereka cahaya kemenangan } 2x

[CHORUS]
 The light shining on them
 Will be blocked by this flag } 8x

[OUTRO]
 Eling-eling rama, sapa eling balia maning
 Eling-elingana wong urip neng alam dunya
 Waru..waru putra, tandurane wong Ngastina
 Angel..angel temen, ngawula dudu desane
 Rama...angel temen

Struktur lirikal ini menampilkan beberapa penanda yang secara sintagmatik terbuka: "mereka" pada verse tidak merujuk pada subjek tertentu, "the light" dan "this flag" pada chorus tidak mengunci referensi, sementara outro Banyumasan menghadirkan suara agraris yang meratapi kesulitan hidup di tanah yang bukan miliknya. Celah-celah sintagmatik inilah yang, sebagaimana akan diuraikan berikut, memungkinkan partisipan mengisi penanda-penanda tersebut dengan konotasi ideologis yang berbeda-beda sesuai konfigurasi wacana yang membentuk subjektivitas mereka.

Pembacaan "Gelap Gempita' dalam Tiga Dimensi Relasi Kekuasaan

Pembacaan kelima partisipan terhadap lagu "Gelap Gempita" secara konsisten menghasilkan konstruksi makna yang terorganisasi dalam tiga dimensi relasi kekuasaan: (1) *imperializing power* yang memproduksi dan menaturalisasi dominasi, (2) subordinasi sebagai kondisi yang diproduksi oleh dominasi tersebut, dan (3)

localizing power yang memproduksi narasi alternatif.

Pembacaan terhadap *verse* menghasilkan tiga sublapis makna yang saling menopang. *Pertama*, **hasrat reproduktif kekuasaan**: keempat baris *verse* secara bersamaan memetakan watak kekuasaan dominan melalui empat dimensi—"otak" (kognitif), "hati" (afektif), "cara" (praksis), dan "harap" (futuritas). Partisipan membaca keempatnya sebagai satu logika di mana kekuasaan adalah dorongan yang tak pernah cukup dan selalu memperluas dirinya. LX membacanya dari persoalan etika moral kekuasaan, SH dari mekanisme distribusi sumber daya, AW dari logika akumulasi kapitalisme, AC dari pengalaman subordinasi, dan WS dari kalkulasi rasional oligarki.

Kedua, **blok kekuasaan sebagai aliansi strategis**: pronomina "mereka" yang tidak merujuk pada subjek tertentu diisi oleh partisipan dengan lapisan yang saling melengkapi. LX mengisinya dengan individu-individu tanpa refleksi, SH dengan kelompok elite patronase, AW dengan posisi struktural yang menghasilkan opresifitas di setiap skala, WS dengan jaringan oligarkis hakim-politisi-tambang yang saling mengunci, dan AC dengan penguasa-pengusaha yang berkomplotan.

Ketiga, **mekanisme reproduksi dan eksklus**: baris "Di dalam cara mereka terpampang kezaliman" dibaca sebagai baris yang menyingkap mekanisme reproduksi melalui absennya orientasi publik, reduksi politik ke kepentingan elite, dan praksis konsolidasi taktis yang dijustifikasi sebagai kewajiban.

Pembacaan terhadap *chorus* ("The light shining on them / Will be blocked by this flag") membuka dimensi keempat,

yakni **hegemoni dan naturalisasi dominasi**. Partisipan membaca “*the light*” dalam dua arah: SH, LX, dan WS membacanya sebagai narasi yang dikonstruksi untuk membangun legitimasi—melalui sorotan media, pencitraan, dan ketimpangan akses panggung wacana—sementara AW dan AC membacanya sebagai posisi dominan dalam relasi kekuasaan itu sendiri, yakni kapasitas untuk memerintah dan akumulasi yang menempatkan elite di puncak hierarki.

Lagu “Gelap Gempita” juga dibaca sebagai representasi **kondisi subordinasi** melalui tiga sublapis. Ketimpangan struktural dan akses diidentifikasi oleh WS melalui kondisi material (kelaparan, ketiadaan akses alat produksi, pajak regresif) dan selektivitas legislasi, sementara AC membacanya dari pengalaman kelompok yang dieksklusi dari perlindungan hukum—petani, pekerja rumah tangga, pekerja informal. Prekaritas dan hilangnya ruang hidup muncul dari pembacaan *outro* berbahasa Jawa Banyumasan. Kesadaran afektif terungkap terutama melalui AC yang secara dialogis berpindah antara posisi aktivis yang harus menjaga semangat dan subjek yang menyimpan pesimisme di “hati terkecilnya,” menandakan bahwa dominasi juga bekerja melalui cara subjek memahami dan membatasi kemungkinan tindakannya sendiri.

Pembacaan terhadap “*will be blocked by this flag*” menghasilkan reklamasi agensi kolektif yang diartikulasikan dari proposisi berbeda tentang kekuasaan. LX mengartikulasikan agensi pada tingkat epistemis (dekonstruksi citra), SH pada tingkat material (solidaritas kolektif), AC sebagai artikulasi afektif yang membangkitkan optimisme, AW sebagai visi tatanan non-hierarkis (“keteraturan

sosial tanpa penguasa, tanpa ada opresifitas”), dan WS sebagai seruan membangun gerakan basis massa yang ia sandingkan dengan “*Workers of the world, unite!*” milik Marx.

Konsistensi pola tiga dimensi ini—yang meski berbeda-beda penekanan—di antara kelima partisipan menunjukkan bahwa “Gelap Gempita” beroperasi sebagai *producerly text* (Fiske, 1989a), yakni teks yang mempertahankan struktur oposisional yang stabil antara pihak yang mendominasi dan pihak yang melawan, tanpa menentukan secara definitif siapa yang mengisi masing-masing posisinya. Celah sintagmatik dalam struktur lirikal dalam “mereka” yang tidak merujuk subjek tertentu, “*the light*” dan “*this flag*” yang tidak mengunci referensi, bukan kelemahan komunikatif, melainkan mekanisme yang mengundang konotasi ideologis untuk mengisi tanda-tanda tersebut (Barthes, 1972).

Polisemi Ideologis dalam Ekskorporasi Tiga Penanda Bercelah

Analisis terhadap cara kelima partisipan mengisi tiga penanda bercelah yang sama menunjukkan bahwa hasil yang muncul bukanlah variasi yang acak, melainkan sistem makna yang terorganisasi secara ideologis.

Tabel 2 Pola ekskorporasi tiga penanda bercelah

Partisipan	“Mereka”	“ <i>The Light</i> ”	“ <i>This Flag</i> ”	Pola Wacana Kritis
LX	Seluruh aktor politik yang menempati maupun bersaing untuk posisi otoritas dalam	Sorotan media yang menciptakan citra baik untuk menyembunyikan wajah asli kekuasaan	Anarkisme sebagai salah satu medium dekonstruksi citra kekuasaan	Kritik etis atas representasi aktor politik

	praktik kekuasaan				membentuk subjektivitas masing-masing partisipan.				
SH	Koalisi elite sebagai patronase yang memusatkan distribusi sumber daya	Keberhasilan semu yang didefinisikan dalam perspektif internal kelompok elite	Pluralitas rakyat yang perlu disatukan sebagai bentuk solidaritas atas satu tujuan melawan ketidakadilan	Kritik ekonomi-politik atas konsentrasi distribusi sumber daya	Tabel 3 Konfigurasi wacana pembaca				
					Parti sipan	Posisi Ideologis	Orientasi Utama	Sikap terhadap Negara	Sikap terhadap Anarkisme
					AC	Feminisme interseksional; humanis; anti-kapitalisme	Pembelaan kelompok rentan	Negara abai terhadap kelompok rentan	Simpati; diartikulasikan sebagai humanisme
AC	Pemangku kebijakan dan pengusaha yang membangun suatu sistem jaringan oligarki elite	Kekuasaan akumulatif yang memosisikan elite di puncak hierarki dalam struktur sosial yang timpang	Anarkisme sebagai salah satu fondasi ideologis yang membuat perubahan mungkin	Kritik struktural atas jejaring oligarki	AW	Anarkisme-kolektivis	Penghapusan hierarki dan negara	Negara harus diabolisi	Diterima secara utuh sebagai kerangka ideologis
					LX	Nasionalis-demokratis; etika moral	Otokritik dan tanggung jawab pada dunia bersama	Negara perlu dikritik dari dalam	Diterima secara fungsional sebagai otokritik
WS	Aliansi strategis konglomerat industri ekstraktif, parlemen, hakim, dan militer yang menguasai politik dan ekonomi	Propaganda elite yang dibangun di atas ketimpangan struktural akan akses pada produksi dan distribusi wacana publik	Pluralitas bentuk resistensi yang dapat diartikulasikan dalam aliansi taktis membangun perlawanan di berbagai front	Kritik struktural-materialis atas aparatus hegemoni	SH	Demokrat sentris; reformis tata kelola	Supremasi sipil dan <i>good governance</i>	Negara harus memenuhi amanat UU	Tidak teridentifikasi
					WS	Sosialis-Marxis; Marhaenisme; nasionalis kiri	Perebutan parlemen untuk kelas pekerja	Negara harus direbut, bukan dihapus	Diakui sebagai tradisi ideologis yang sah; ditanggukkan demi persatuan
AW	Siapa pun dalam posisi dominan di tiap tingkatan relasi sosial	Kapasitas untuk memerintah yang dimiliki posisi kekuasaan dominan dalam relasi kuasa	Anarkisme sebagai visi keteraturan sosial tanpa penguasa	Kritik anti-otoritarianisme atas relasi kuasa dominan					

Setiap pemaknaan atas tiga penanda tidak memuat isian yang berdiri sendiri, melainkan saling terkait dalam satu kerangka wacana yang koheren. Konsistensi ini mengindikasikan bahwa yang bekerja dalam pembacaan bukan sekadar preferensi interpretatif, melainkan formasi wacana yang bersifat sistematis (Fiske, 1987; 1989a). Wacana tidak hadir sebagai kumpulan gagasan yang terpisah, tetapi sebagai cara tertentu dalam menyusun realitas. Ketika satu formasi wacana teraktivasi, ia mengorganisasi keseluruhan relasi makna yang terbentuk dalam pembacaan.

Perbedaan pola eksorporasi dapat dijelaskan melalui konfigurasi wacana yang

Relasi antara struktur tekstual dan konfigurasi wacana pembaca memperlihatkan keteraturan. Penanda-penanda bercelah yang sama menghasilkan artikulasi yang terarah oleh kerangka wacana yang dibawa masing-masing pembaca: pembacaan LX bergerak dalam kerangka moral-dekonstruktif, SH dalam logika redistributif, AC dalam horizon humanis-interseksional, WS melalui analisis kelas, dan AW melalui posisi anti-otoritarianisme. Yang berbeda bukan sekadar isi makna, melainkan prinsip pengorganisasi yang membuat makna tersebut menjadi koheren.

Negosiasi Fragmen Anarkis dan Eksorporasi ke Wacana Demokratis

Proses negosiasi terhadap fragmen anarkis dalam teks berlangsung melalui tiga

tahap. *Pertama, legitimasi kritik dan otonomi ekspresif*: partisipan bersentuhan dengan elemen anarkisme bukan melalui konsep politiknya, melainkan melalui kebebasan yang melekat pada punk dan kekaguman terhadap figur Sukatani yang melampaui batas normatif identitasnya.

Kedua, kontestasi makna radikal: label “radikal” yang digunakan wacana hegemonik untuk mendelegitimasi perlawanan didekonstruksi oleh seluruh partisipan. LX menggeser makna radikal dari konotasi ancaman ke akar rumput melalui permainan semantik radix, SH mengekspos absurditas logika kekuasaan yang membaca solidaritas rakyat—bukan isi ideologis—sebagai ancaman sesungguhnya, AC merelativasi makna radikal dengan mempertajam batas antara definisi hegemonik dan definisi yang ia anggap mendasar, dan AW membalikinya menjadi ukuran konsistensi ideologis yang justru menilai “Gelap Gempita” belum cukup radikal.

Ketiga, eksorporasi anarkisme ke wacana demokratis: LX menerima anarkisme secara fungsional sebagai otokritik dalam kerangka nasionalis-demokratis; AC mengeksorporasinya melalui humanisme universal; WS menanggukkan determinasi ideologis demi persatuan gerakan; SH tidak mengidentifikasi fragmen anarkisme; dan AW mengartikulasikannya secara utuh sebagai visi “keteraturan sosial tanpa penguasa.”

Tabel 4 Posisi pembacaan partisipan

Dimensi	LX	SH	AW	AC	WS
Pembacaan teks “Gelap Gempita”	Teks bersimbol anarkis	Teks solidaritas rakyat	Teks anarkis	Teks humanis dengan basis anarkis	Teks seruan agitasi
Pembacaan fragmen anarkis	Menerima anarkisme secara fungsional	Tidak mengidentifikasi fragmen	Menerima anarkisme secara utuh sebagai	Mengeksorporasi anarkisme melalui	Mengakui anarkisme sebagai salah satu

	dalam kerangka nasionalis-demokratis	anarkisme	kerangka pembacaan	kerangka humanisme universal	kemungkinan ideologis, tetapi menanggukkan definisi tunggal demi strategi gerakan
Kata kunci	Otokritik	Stimulus ekonomi; Solidaritas	Keteraturan tanpa penguasa; Nota kerja; Opresifitas	Memanusia; Kelompok kecil	Gerak dulu; Biarkan rakyat yang bangun; Eksploitasi

Temuan ini menegaskan bahwa eksorporasi bukanlah proses mengisi kekosongan secara spontan, melainkan praktik apropriasi posisional di mana seluruh konfigurasi diskursif pembaca teraktivasi secara simultan dalam momen pembacaan (Fiske, 1989a). Yang diambil bukanlah ideologi anarkisme secara utuh, melainkan elemen-elemen tertentu—kritik terhadap kekuasaan, protes terhadap ketimpangan, dan seruan untuk bertindak—yang kemudian dimaknai ulang dalam konteks yang berbeda dari asalnya.

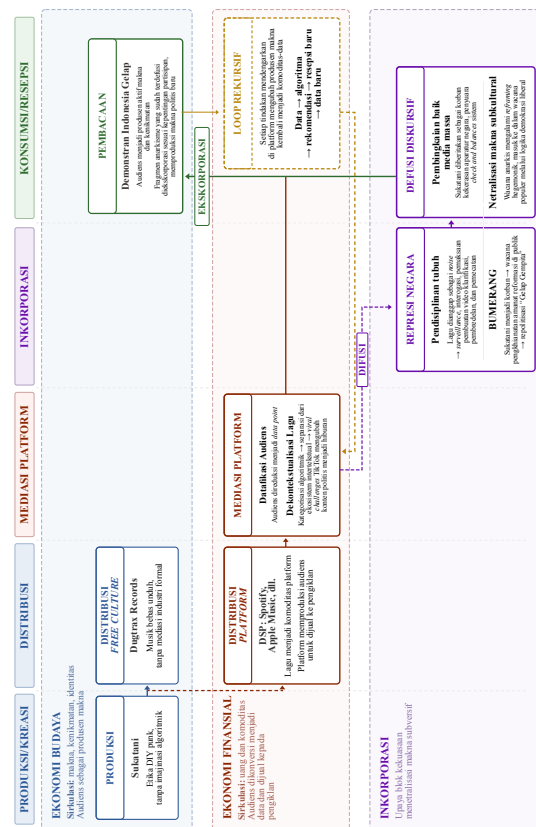
Trajektori Dekontekstualisasi Teks “Gelap Gempita”

Untuk memahami mengapa eksorporasi ini dapat terjadi—mengapa teks anarkis dapat dibaca secara demokratis oleh demonstiran arus utama—diperlukan analisis terhadap trajektori sirkulasi yang mengubah kondisi ideologis teks sebelum momen pembacaan berlangsung.

Titik mula sirkulasi “Gelap Gempita” bukan dari ekonomi finansial, melainkan dari ekonomi kultural. Produksi album ini berjalan dalam logika yang secara struktural menolak komodifikasi: perekaman di Ruang Gulma, distribusi melalui Dugtrax Records dengan lisensi Creative Commons, dan kendali penuh

personel atas seluruh tahap produksi. Namun, distribusi simultan melalui platform streaming (Spotify, Apple Music) menciptakan kontradiksi produktif di mana ekonomi kultural dan ekonomi finansial beroperasi secara paralel pada teks yang sama (Fiske, 1989b).

Gambar 3 Trajektori sirkulasi makna teks “Gelap Gempita”



Begitu memasuki platform, teks mengalami dekontekstualisasi berjenjang. Kategorisasi algoritmik menggantikan konteks produksi asli (kolektif DIY, scene anarko-punk) dengan kategori yang melayani logika rekomendasi platform. Separasi intertekstual memisahkan lagu dari ekosistem teks aslinya (zine, pertunjukan langsung, wacana subkultural). Viralitas platform mentransformasi konten politis menjadi format hiburan melalui klip pendek (Raffa & Pronzato, 2025). Represi negara melalui

pendisiplinan tubuh (Fiske, 1993)—*surveillance*, interogasi, pemaksaan video klarifikasi, pembredelan—menjadi bumerang yang mengakselerasi sirkulasi lebih jauh. Pembungkahan media massa kemudian men-defusi muatan anarkis melalui reframing ke dalam wacana demokrasi liberal—apa yang Thornton (1995) sebut sebagai kiss of death secara diskursif.

Bukti empiris dari trajektori ini terlihat dalam variasi perjumpaan kelima partisipan: SH melalui kurasi Album Pilihan Tempo 2023, WS melalui viralitas pasca-pembredelan, LX melalui peredaran media sosial, AW melalui kliper TikTok, dan AC melalui kedekatan panggung indie pop. Seluruh partisipan secara eksplisit menolak identifikasi sebagai "anak skena," menunjukkan bahwa teks yang sampai ke tangan mereka sudah mengalami minimal dua lapis dekontekstualisasi sebelum momen pembacaan berlangsung.

Dekontekstualisasi ini bukan penghapusan makna, melainkan kondisi yang memungkinkan eksorporasi. Justru karena fragmen anarkis dalam teks sudah terlepas sebagian dari konteks asalnya, demonstran yang tidak berasal dari skena punk dapat mengaksesnya sebagai sumber daya semiotik yang terbuka untuk diartikulasikan ulang sesuai posisi sosial dan kepentingan mereka. Inkorporasi, sebagaimana ditegaskan Fiske (1989a), tidak pernah sepenuhnya berhasil—justru di celah yang tidak berhasil diinkorporasi itulah ekonomi kultural mengambil alih.

Konvergensi Oposisional dan Aliansi Taktis

Meskipun cara setiap partisipan menggunakan teks berbeda, empat dari lima partisipan, terlepas dari perbedaan kerangka ideologisnya, mengartikulasikan

pembacaan dalam satu oposisi yang sama: rakyat melawan blok kekuasaan. LX membacanya sebagai warga yang berhak mengkritik pejabat yang absen dari tanggung jawab publiknya, SH sebagai rakyat yang mengalami kegelapan dan berusaha keluar dari kondisi tersebut dengan melawan elite yang merayakan cahaya semu, AC sebagai kelompok rentan yang harus dibela dengan menuntut pemerintah dan oligarki untuk memanusiakan manusia, sementara WS sebagai masyarakat sipil yang berhadapan dengan jaringan elite politik oligarkis untuk merebut dan membangun kembali sistem.

Konvergensi ini bukan kebetulan. Dalam kerangka Fiske (1989a), kekuasaan populer tidak berangkat dari identitas yang stabil, melainkan dari kemampuan subjektivitas yang terfragmentasi untuk membentuk aliansi yang bersifat taktis dan kontekstual. Pembaca yang berangkat dari feminisme interseksional (AC), Marhaenisme (WS), etika moral (LX), maupun reformisme tata kelola (SH) tetap dapat beroperasi dalam satu formasi oposisional yang sama, bukan karena mereka berbagi identitas, melainkan karena mereka berbagi posisi relasional terhadap kekuasaan dalam momen tertentu. Kesamaan yang muncul bertumpu pada posisi bersama dalam relasi kekuasaan, bukan pada keseragaman identitas atau ideologi.

Absennya Kiri Sebagai Kondisi yang Membatasi Artikulasi

Meskipun konvergensi oposisional terbentuk, arah artikulasi yang muncul tetap dibentuk oleh lanskap diskursif yang lebih luas. Pasca-1965, hegemoni kultural Orde Baru berhasil membersihkan leksikografi politik Kiri secara sistematis dari ruang publik (Heryanto, 2008; 2018). Analisis

kritis berbasis kelas, konsep prekaritas kapital, dan alternatif ideologis di luar kerangka demokrasi liberal-kapitalistis ditiadakan dari diskursus populer. Generasi demonstran hari ini lahir dan tumbuh dalam lanskap diskursif di mana bahasa untuk menyuarakan pengalaman ketimpangan dari perspektif kelas telah absen.

Dalam kondisi ini, demonstran secara taktis mengambil bentuk perlawanan dari teks tanpa mengambil isinya secara penuh. Kemarahan material atas kenaikan PPN, krisis tenaga kerja, dan prekaritas ekonomi tidak memiliki kosakata ideologis yang memadai untuk diartikulasikan secara struktural. Yang tersedia adalah bahasa akuntabilitas, transparansi, dan hak konstitusional.

Temuan ini menunjukkan bahwa yang terjadi bukan penolakan sadar terhadap muatan anarkis teks, melainkan ketidaktersediaan alat diskursif untuk mengartikulasikannya. Teks anarkis tidak dapat dibaca secara anarkis oleh mayoritas pembacanya bukan karena mereka secara sadar menolaknya, melainkan karena kerangka untuk melakukannya tidak tersedia dalam repertoar kultural mereka. Melalui proses ini, muatan radikal dalam lagu direartikulasi sebagai seruan untuk mempertahankan kedaulatan demokrasi—teks anarkis dipaksa menjadi pembela demokrasi untuk mengisi kekosongan bahasa resistensi rakyat.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa demonstran Indonesia Gelap memaknai “Gelap Gempita” secara beragam namun tidak acak. Di antara lima informan, empat melakukan pembacaan negosiatif terhadap muatan anarkisme, sementara satu menerimanya secara lebih utuh. Pemaknaan tidak bergerak ke arah penerimaan seragam atas ideologi anarkisme, melainkan menunjukkan upaya penyesuaian, penggeseran, dan perakitan ulang makna sesuai horizon ideologis, pengalaman material, dan orientasi politik masing-masing. Lagu “Gelap Gempita” diterima bukan sebagai teks anarkis yang harus dibaca literal, tetapi sebagai sumber daya semiotik untuk mengartikulasikan kritik terhadap cara kekuasaan dikelola.

Fragmen ideologi anarkis mengalami dekontekstualisasi ketika represi negara dan mediasi platform memaksa teks beredar di ranah budaya populer. Dalam konteks subkulturalnya, “Gelap Gempita” terhubung dengan etos punk dan politik prefiguratif Sukatani. Namun ketika menjadi populer, fragmen anarkis terlepas sebagian dari konteks asalnya dan bergeser menjadi penanda kritik yang lebih longgar dan terbuka. Ia tetap ada sebagai potensi makna, tetapi konteks penerimaan yang berubah membuatnya dapat dibaca ulang dalam horizon wacana berbeda.

Demonstran melakukan reinterpretasi dengan mengekskorporasi fragmen anarkis ke dalam kerangka kritik demokratis yang berbeda: LX mengartikulasikannya sebagai otokritik bangsa, SH sebagai solidaritas kerakyatan, AC sebagai pembelaan kelompok rentan, WS sebagai seruan agitasi strategis, dan AW menerimanya paling utuh melalui kerangka anarkisme-kolektivis. Meski begitu, sebagaimana anarkisme itu sendiri bukanlah suatu tuntutan ideologis tunggal, melainkan sebuah spektrum ideologis penolakan terhadap hierarki dan negara, meski AW melakukan pembacaan yang paling dekat dengan akar ideologis teks, ia juga sebenarnya menegosiasikan pesan ideologis tersebut untuk dipahami melalui kerangka anarkisme-kolektivis Bakunin, yang belum tentu searah dengan pandangan anarkisme dari produsen teks itu sendiri, yakni Sukatani.

Popularisasi “Gelap Gempita” tidak menghapus jejak anarkisme yang diekspresikan dalam bentuk teks, tetapi membuka ruang repolitisasi, di mana fragmen ideologisnya dinegosiasikan menjadi bahasa kritik yang lebih sesuai dengan kebutuhan artikulasi politik demonstran, yang dibatasi sekaligus dimungkinkan oleh warisan diskursif pasca-Orde Baru.

REKOMENDASI

Bagi Kreator Subkultural

Pertama, kolektif musisi bawah tanah yang mendistribusikan karya melalui platform *streaming* perlu menyertakan strategi literasi konteks yang menyertai distribusi. *Liner note*, zine, atau konten pendamping yang memaparkan genealogi ideologis karya perlu disisipkan sebagai metadata atau konten pendamping yang dapat diakses bersamaan dengan lagu, sehingga fragmentasi makna oleh algoritma platform dapat diminimalisasi. *Kedua*, kreator perlu menyadari bahwa sifat *producerly* dari teks yang mereka produksi menjadikan karya rawan mengalami defusi ketika memasuki ekosistem platform kapitalis. Oleh karena itu, strategi distribusi ganda perlu diperkuat dengan jalur distribusi ketiga yang bersifat edukatif, misalnya melalui sesi diskusi publik, *podcast*, atau kolaborasi dengan kolektif literasi yang mampu menjaga kedalaman wacana.

Bagi Aktivis dan Organisasi Gerakan Sosial

Pertama, organisasi gerakan sosial perlu mengembangkan program literasi diskursif yang secara eksplisit memperluas repertoar kultural anggotanya di luar bahasa hegemonik. Temuan menunjukkan bahwa batas artikulasi demonstran bukan karena penolakan sadar, melainkan karena

ketidaktersediaan kosakata ideologis alternatif dalam repertoar kultural. Program pembacaan kolektif, diskusi tematik, dan produksi media mandiri yang memperkenalkan kerangka analisis struktural dapat memperkaya kapasitas eksorporasi terhadap pesan-pesan protes. *Kedua*, aktivis perlu memahami mekanisme siklus inkorporasi-eksorporasi wacana subkultural agar mampu membalikkan bentuk-bentuk represi aparat secara strategis, yakni dengan mengidentifikasi momen di mana represi dapat dibaca sebagai momen yang memungkinkan impuls perlawanan diekspresikan dan mendapat dukungan solidaritas publik, sebagaimana yang terjadi pada kasus Sukatani.

Bagi Penelitian Selanjutnya

Pertama, pendekatan metodologis perlu diperluas dengan menggabungkan etnografi lapangan dan observasi partisipatoris dalam ruang demonstrasi atau kegiatan kolektif. Wawancara mendalam efektif menangkap repertoar kultural dan proses diskursif, tetapi memiliki keterbatasan dalam menangkap dimensi afektif dan ketubuhan (*jouissance*) yang menyertai praktik kolektif seperti bernyanyi bersama, berteriak, dan membangun solidaritas emosional di tengah kerumunan aksi. Etnografi lapangan memungkinkan dokumentasi langsung atas

dimensi *jouissance* yang membentuk pengalaman budaya populer secara lebih utuh. Diskusi kelompok terarah (FGD) juga perlu dipertimbangkan untuk mengamati bagaimana makna diproduksi secara kolektif dalam kelompok interpretif. *Kedua*, jumlah dan keberagaman partisipan perlu diperluas untuk memperkaya variasi posisi pembacaan, mengingat keterbatasan penelitian ini yang dipengaruhi oleh kondisi represif selama periode pengumpulan data. Perluasan ini sebaiknya menjangkau kelompok usia, geografis, dan kelas sosial yang lebih beragam untuk menguji apakah pola konvergensi oposisional yang ditemukan dalam penelitian ini bersifat universal atau terikat pada kondisi sosio-kultural tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriadi, D., & Andiko, B. (2025). Punk music and social criticism in Indonesia. *ASRI*, (29), 17–34.
- Agawu, V. K. (1991). *Playing with Signs*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Akhtar, A., Sullivan, P., Alam, Y., & Locke, A. (2024). Using hybrid qualitative analysis to explore lived experience. *Methods in Psychology*, 11.
- Al Fajri, M. F. (2024). Nilai-nilai Bawah Tanah. *EMIK*, 7(1), 1–16.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2014). Indonesian Politics in 2014. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(3), 347–369.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Southeast Asia's Troubling Elections. *Journal of Democracy*, 30(4), 104–118.
- Ayu, D. R. (2025, February 20). Duduk Perkara Grup Band Sukatani Minta Maaf ke Kapolri. *Tempo.co*.
- Barthes, R. (1972). *Mythologies*. New York: Noonday Press.
- Bourdieu, P. (1984). *Distinction*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597.
- Butcher, T. J. (2021). *Developing Identity* (Master's Thesis). University of Vermont.
- Cahya, M. F. N. (2015). Fenomenologi Anarkisme. *Jurnal Unair*, 4(1), 1–10.
- Chinnici, G. (2008). *A-Cerchiata*. Milan: Elèuthera.
- CNN Indonesia. (2025b, February 21). Massa Indonesia Gelap Surabaya Kepung DPRD Jatim. *CNN Indonesia*.
- Diprose, R., McRae, D., & Hadiz, V. R. (2019). Two Decades of Reformasi in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 49(5), 691–712.
- Donaghey, J. (2016). *Punk and Anarchism: UK, Poland, Indonesia* (Doctoral Dissertation). Loughborough University.
- [DR018] SUKATANI – Gelap Gempita. (2023, July 24). *Dugtrax*. <https://dugtraxrecords.wordpress.com/2023/07/24/dr018-sukatani-gelap-gempita/>
- Ehrlich, H. J. (1996). *Reinventing Anarchy, Again*. San Francisco: AK Press.
- Fiske, J. (1987). *Television Culture*. London: Methuen.
- Fiske, J. (1989a). *Reading the Popular*. Winchester, MA: Unwin Hyman.
- Fiske, J. (1989b). *Understanding Popular Culture*. Winchester, MA: Unwin Hyman.
- Fiske, J. (1993). *Power Plays, Power Works*. London: Verso.
- Groth, S. K., & Bubandt, N. (2025). Trance Against the Machine. *Annals of the Entomological Society of America*, 6(2), 125–148.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The political economy of oligarchy. *Indonesia*, (96), 35–57.
- Hannerz, E. (2013). *Performing Punk* (Doctoral Thesis). Uppsala Universitet.
- Hayati, I. (2025, February 22). Novi Sukatani Dipecat. *Tempo.co*.
- Hebdige, D. (1979). *Subculture: The Meaning of Style*. London: Routledge.
- Heryanto, A. (2008). *Popular Culture in Indonesia*. Abingdon: Routledge.
- Heryanto, A. (2018). Popular Culture and Identity Politics. In R. W. Hefner (Ed.), *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia* (pp. 357–368). Abingdon: Routledge.

- Iman, M. F. S. (2025). Citizens' resistance against repressive state apparatuses through music. *Jurnal Studi Komunikasi*, 9(3), 761–770.
- Indah Syahputri, F., & Arviani, H. (2026). Penerimaan Masyarakat Jakarta terhadap Citra Polri. *Jurnal JTIK*, 10(2), 769–784.
- Kinna, R. (2005). *Anarchism: A Beginner's Guide*. Oxford: Oneworld.
- Komisi Pencari Fakta. (2026). *Operasi Pembungkaman Kaum Muda Terbesar Sejak Reformasi*. Jakarta.
- Kompas.com. (2025, February 24). Soal Lagu Band Sukatani, Komisi III: Seharusnya Polri Tak Reaktif Atas Kritik. Kompas.com.
- KompasTV Jateng. (2025, February 25). Aksi Solidaritas untuk Band Sukatani. Kompas.TV.
- Lova, C., & Maharani, D. (2025, February 24). Pihak Label Band Sukatani Buka Suara. Kompas.com.
- Moog, S. (2020). *Under the Radar* (Doctoral dissertation). University of Arkansas.
- Moog, S. (2023). Punk Worlding. *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 24(3), 234–250.
- Morley, D. (1992). *Television, Audiences and Cultural Studies*. New York: Routledge.
- Nugroho, N. P. (2025, February 21). Massa Aksi Indonesia Gelap Nyanyikan Lagu Bayar Bayar Bayar. Tempo.co.
- Nurikhsan, F. (2025, March 2). LBH Semarang Ungkap Intimidasi Polisi terhadap Grup Band Sukatani. Espos.id.
- Pirate Book [Zine]. (2017). Purbalingga.
- Power, T. P. (2018). Jokowi's authoritarian turn. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 307–338.
- Pramudita, A. (2010). *Free Culture Sebagai Alternatif* (Bachelor's Thesis). Universitas Indonesia.
- Prasetyo, F. A. (2017). Punk and the City. *Punk & Post-Punk*, 6(2), 189–211.
- Putra, B. S. (2018). *Perang yang Tidak Akan Kita Menangkan*. Yogyakarta: Pustaka Catut.
- Rachmat, B. (2025, April 28). Wawancara Eksklusif Band Punk Sukatani. Medcom.id.
- Raffa, M., & Pronzato, R. (2025). The Social Life of an Optimised Song. *Popular Music*, 44(1), 62–80.
- Rodman, R. (1997). And Now an Ideology from Our Sponsor. *College Music Symposium*, 37, 21–48.
- Rosana, F. C. (2025, March 2). *Biang Marah Generasi Resah*. Majalah Tempo, 28–35.
- Sadler, O. (2022). Defiant Amplification or Decontextualized Commercialization? *Social Media and Society*, 8(2).
- Slater, D. (2004). Indonesia's Accountability Trap. *Indonesia*, (78), 61–92.
- Sobat-Ngantuk. (2020, April 26). Sudah Krisis? Saatnya Menanam! [Podcast]. Sobat-Ngantuk.
- Sudarsono. (2004). *Kenakalan Remaja* (4th ed.). Jakarta: Rineka Cipta.
- Tarigan, D. (2024, February 4). *Album Gelap Gempita, Suara Keresahan Duo Sukatani*. Tempo.
- Thornton, S. (1995). *Club Cultures*. Cambridge: Polity Press.
- UGM. (2025, March 3). Soal Polemik Lagu Band Sukatani. UGM.
- Warburton, E. (2016). Jokowi and the New Developmentalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(3), 297–320.
- Widagdo, T. B., et al. (2026). Membongkar Daya Subversif Album Gelap Gempita. *Disastra*, 8(1), 34–58.
- Williams, R. (1977). *Marxism and Literature*. Oxford: Oxford University Press.
- Woodcock, G. (1962). *Anarchism*. Cleveland, OH: The World Publishing Company.
- Xiao, Y., & Donaghey, J. (2022). Punk in Indonesia and China. *Punk & Post-Punk*, 11(2), 193–214.